

KEGIATAN DPR-RI

MINGGU KETIGA AGUSTUS 2012

Kegiatan DPR pada pertengahan Agustus 2012, selain melakukan kunjungan ke daerah (Kunker), juga telah dimulai kembali Masa Persidangan I 2012-2013, yang ditandai dengan Pidato Pembukaan Masa Persidangan I 2012-2013 oleh Ketua DPR pada 16 Agustus malam hari. Sebelumnya pada pagi hari 16 Agustus, telah berlangsung Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI dengan acara Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-67 Kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut ringkasan kegiatan tersebut.

Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI 16 Agustus

Sidang bersama DPR dan DPD RI pada 16 Agustus pukul 10.00 wib, mengagendakan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-67 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI merupakan pelaksanaan pasal 199 ayat (5) dan pasal 268 ayat (5) UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI juga dimaksudkan sebagai prosesi simbolik pertanggungjawaban politik kebangsaan dan kenegaraan dari Presiden kepada rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR dan DPD. Bahkan, sidang ini disaksikan oleh forum resmi jajaran pemerintahan dan tokoh masyarakat di daerah-daerah dan oleh rakyat melalui ruang-ruang publik.

Pada sidang bersama tahun ini, DPR-RI berperan sebagai tuan rumah. Ketua DPR yang memimpin sidang menyampaikan beberapa hal antara lain, bahwa peringatan kemerdekaan RI ke-67, hendaknya menjadi momentum bagi segenap bangsa Indonesia untuk bercermin, melakukan introspeksi, refleksi dan evaluasi terhadap perjalanan setelah lebih dari enam dasawarsa kita merdeka, untuk memastikan arah perjalanan bangsa ke depan. Walaupun telah melalui reformasi di bidang politik, ekonomi dan sosial-kemasyarakatan sejak tahun 1998, namun kita masih merasakan bahwa masih banyak yang harus ditata-dirawat dan dikelola secara baik dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.

Indonesia adalah negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, yang telah diakui oleh masyarakat dunia. Ruang demokrasi yang telah dibuka lebar, melalui amandemen UUD Negara RI tahun 1945 dan perundang-undangan lainnya, ha-

Oleh: Ketua DPR RI, DR. H. Marzuki Alie



rus makin berkualitas dalam mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa.

Peradaban demokrasi yang dibangun, harus bersendikan kepada hakikat kemanusiaan dan keadilan sosial, menjunjung supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia, penghargaan kepada keberagaman, pluralisme, dalam bingkai kebangsaan, dan harus memberikan penguatan bagi *nation and character building*. Satu hal yang harus tetap kita jaga, aset terpenting dari kemerdekaan Republik Indonesia adalah persatuan dan kesatuan bangsa. Bagi kita, persatuan adalah kekuatan yang merupakan awal dari kebangkitan. Sejarah telah membuktikan, betapapun beratnya tan-

tangan yang dihadapi, persoalan besar yang menghadang bangsa dan negara, kita mampu mengatasinya dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI. Dalam konteks menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan itulah, kita harus mampu menangkal aksi-aksi anarkhisme, radikalisme, terorisme dan separatisme dari bumi nusantara yang kita cintai.

Pembukaan Masa Sidang I 2012-2013

Pembukaan Masa Sidang I 2012-2013 yang biasanya berlangsung siang hari pukul 14.00 wib, kali ini berlangsung malam hari yaitu pukul 20.00 wib. Sidang yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota DPD-RI ini, mengagendakan Pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN 2013 dan Nota Keuangannya. Kehadiran seluruh Pimpinan dan Anggota DPD-RI dalam agenda Sidang Paripurna DPR-RI malam tersebut, mencerminkan spirit politik kenegaraan di dalam

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA : BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita **PENGAWAS UMUM:** Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH:** Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA:** Djaka Dwi Winarko **PIMPINAN REDAKSI:** Dwi Maryanto, S.Sos (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIMPINAN REDAKSI:** Dadang Prayitna, S.IP.,MH (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI:** Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto,S.Sos; Iwan Armanias; Suciati,S.Sos; Agung Sulistiono, SH; M. Ibnur Khalid; **PENANGGUNGJAWAB FOTO:** Eka Hindra; Rizka Arinindya **SIRKULASI:** Supriyanto **Diterbitkan Oleh:** Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991

satu rangkaian kegiatan bersama, berkaitan dengan fungsi DPD-RI dalam memberikan pertimbangan atas Pembahasan RAPBN, sesuai UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 154.

Dalam Pidato Pembukaan Masa Sidang I, Ketua DPR menyampaikan intisari pembahasan hasil Pembicaraan Pendahuluan APBN 2013 yang bertema pokok: “Memperkuat Perekonomian Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat“. Mengenai perencanaan awal target pertumbuhan ekonomi 6,8%—7,2%, DPR mengingatkan adanya persyaratan penting untuk mencapai angka pertumbuhan, berikut tingkat kualitas pertumbuhan yang akan dicapai. Sebab, ada kekhawatiran bahwa perekonomian Indonesia akan menghadapi tantangan yang sangat berat di tahun 2013. Untuk menghadapi krisis finansial jangka pendek perlu peningkatan kesiagaan fiskal (*fiscal back-up*).

Pada saat bersamaan, Pemerintah juga harus mempersiapkan berbagai kebijakan yang mendukung pertumbuhan jangka menengah dan jangka panjang, di tengah perekonomian dunia yang cenderung melemah. Dewan meminta, Pemerintah tidak terbuai dengan hasil pertumbuhan ekonomi yang dicapai dalam 3 tahun terakhir. Pemerintah perlu memberikan bukti yang realistis dalam upaya penciptaan lapangan kerja baru, dan program jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah yang tepat sasaran. Perlu diingatkan bahwa semua negara dalam era globalisasi, cepat atau lambat akan terpengaruh dan tidak kebal terhadap krisis, termasuk Indonesia. DPR meminta Pemerintah untuk bekerja lebih keras dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkat kuatnya faktor konsumsi domestik dan investasi.

Selain itu, Ketua DPR juga menyoroti kebijakan pengendalian BBM bersubsidi dan kebijakan pengembangan energi alternatif. DPR terus mendorong Pemerintah untuk secara konsisten melaksanakan kebijakan penghematan konsumsi BBM bersubsidi yang cenderung terus meningkat.

Berdasar masukan dari DPD-RI, Ketua DPR menyam-

paikan beberapa hal terkait dengan pembangunan daerah. *Pertama*, dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial serta dalam memacu percepatan pembangunan daerah, penyusunan kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2013, harus memperhitungkan optimalisasi seluruh instrumen negara baik berupa belanja pusat dalam bentuk dana dekonsentrasi/tugas perbantuan, dana transfer daerah, dana perbankan, dan investasi swasta, maupun sumber dana lainnya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Kedua, penyusunan RAPBN 2013 harus memberikan pemihakan kepada daerah-daerah yang relatif tertinggal dan rentan terhadap gejolak perekonomian nasional dan global. Bahwa dampak yang dirasakan oleh setiap daerah akan berbeda sesuai dengan struktur ekonomi, daya tahan, dan kapasitas fiskal setiap daerah. Pengajuan RAPBN Tahun 2013 juga perlu dilengkapi dengan skenario dampak perubahan perekonomian makro terhadap perekonomian daerah. Pemerintah didorong untuk menyampaikan perincian perkiraan dampak pelambatan ekonomi nasional terhadap perekonomian daerah, terutama dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan di setiap provinsi.

Ketiga, sejalan dengan penurunan asumsi pertumbuhan ekonomi, Pemerintah juga perlu mengimbanginya dengan upaya penajaman kebijakan dan program pembangunan untuk menjaga momentum percepatan pertumbuhan ekonomi nasional dan menjamin percepatan pembangunan bagi daerah-daerah yang relatif tertinggal. *Keempat*, terkait dengan alokasi belanja, Pemerintah harus menggunakan pendekatan keseimbangan antar-daerah, keadilan, dan pemihakan kepada daerah-daerah yang relatif tertinggal. Oleh karena itu, Pemerintah harus cepat menanggulangi berbagai hambatan dalam pengelolaan dana transfer daerah yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan dan kurang optimalnya penyerapan belanja daerah dengan langkah dan kebijakan yang tepat dan terukur.

Terkait dengan hasil Prolegnas selama satu tahun ini, Ket-



ua DPR menyampaikan bahwa capaiannya belum optimal, dan tidak berbanding lurus dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Satu Tahun Sidang hanya 26 RUU yang telah diselesaikan, berupa RUU prioritas dari DPR dan Pemerintah dan RUU Kumulatif terbuka berkaitan dengan pengesahan APBN dan pengesahan konvensi.

Ketua DPR juga menyebutkan kendala yang ditemui yang menjadi hambatan dalam proses penyelesaian RUU terutama karena adanya perbedaan pandangan yang cukup tajam terhadap suatu substansi baik antara DPR dan Pemerintah, maupun antar fraksi-fraksi di DPR. Dalam hal ini, Pimpinan DPR meminta Presiden untuk membantu meminimalisir hambatan, sehingga efektifitas penyelesaian RUU dapat dioptimalkan. Untuk kalangan DPR, diharapkan fraksi-fraksi dapat mengarahkan anggotanya agar pembahasan RUU dapat efektif dilakukan. DPR berpandangan bahwa Prolegnas adalah tanggung jawab bersama, mengingat Prolegnas disusun sebagai instrumen pembangunan hukum, sekaligus sebagai bagian dari pembangunan nasional yang pada hakekatnya menjadi sarana untuk mewujudkan tujuan nasional. Prolegnas disusun berdasarkan pada kebutuhan hukum yang nyata dan terukur.

DPR bersyukur, diantara RUU yang sudah disetujui, RUU tentang Pendidikan Tinggi yang pembahasannya mengalami beberapa kali perpanjangan, telah diselesaikan. Pembahasan telah dilakukan secara ketat dan komprehensif dengan menerima banyak masukan dari kelompok-kelompok masyarakat, pemangku kepentingan dan para pemerhati dunia pendidikan tinggi. RUU Pendidikan Tinggi telah memastikan tidak terjadi komersialisasi dan liberalisasi, dengan mengharuskan penyelenggaraan pendidikan tinggi berprinsip nirlaba, memastikan adanya tanggung jawab pendanaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, mendorong dunia usaha, dunia industri dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendanai pendidikan tinggi. Semua pihak menyadari bahwa pendidikan tinggi merupakan tulang punggung bagi terciptanya masyarakat berbasis ilmu pengetahuan agar

mampu memenangi persaingan dalam perekonomian dunia yang makin bergeser pada basis ilmu pengetahuan. Untuk mempercepat dan mendorong pembangunan bangsa, diperlukan anak bangsa yang cerdas komprehensif. RUU ini juga meletakkan harapan pada Perguruan Tinggi untuk menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa, membudayakan dan memberdayakan bangsa dari Sabang sampai Merauke berdasar Pancasila dan UUD NRI tahun 1945.

Selain beberapa hal tersebut, Ketua DPR juga mengulas beberapa isu terkini. Dalam hal penegakan hukum Ketiga aparat penegak hukum ini diminta untuk bekerja secara profesional, melakukan koordinasi yang sinergis dalam menuntaskan proses penyelidikan dan penyidikan dengan lebih tepat, cepat dan tidak berlarut-larut, yang dilandasi kesadaran bahwa kita sedang mengemban tugas untuk mewujudkan cita-cita nasional dan untuk mencapai tujuan nasional. Dalam melaksanakan tugas, semua aparat penegak hukum diminta untuk patuh kepada peraturan perundang-undangan.

Dalam Masalah pertanahan, Ketua DPR mengatakan Konflik agraria dengan berbagai pemicu atau faktor penyebab, harus menjadi perhatian serius dalam kaitan dengan upaya menemukan solusi jangka panjang tentang masalah agraria. Persoalan agraria yang muncul akhir-akhir ini merupakan kebijakan dalam rangkaian antar-rezim pemerintahan, akan tetapi pengelolaannya saat ini danantisipasi atas berbagai masalah potensial berikutnya, harus tetap menjadi prioritas untuk ditangani. Di sisi lain, kiranya reforma agraria yang sudah direncanakan 10 (sepuluh) tahun yang lalu sudah dapat segera dituntaskan.

Selain itu, Ketua DPR juga menyinggung masalah Tenaga Kerja Indonesia. Permasalahan TKI sebenarnya sudah diatur dalam UU No. 39 Tahun 2004. Namun kenyataannya, UU tersebut belum sepenuhnya memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang menyeluruh. Oleh karena itu, DPR menganggap perlu melakukan revisi terhadap UU tersebut. Revisi ini telah disiapkan oleh Komisi IX, dan telah disetujui menjadi RUU DPR dan siap dibahas pada Masa Sidang yang akan datang dengan judul RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

Ketua DPR juga menyinggung tentang persiapan Idul Fitri, terkait kebutuhan pokok dan infrastruktur transportasi, dan lain-lain.

Diplomasi parlemen juga diangkat terutama persiapan Indonesia menjadi tuan rumah Sidang Umum AIPA ke 33 di Lombok. Dalam hal diplomasi parlemen, Ketua DPR juga menyinggung masalah Palestina dan Rohingya. Untuk masalah Rohingnya, DPR berpendapat, nasib warga Rohingnya, harus direspons serius oleh badan-badan internasional. ASEAN sebagai organisasi regional yang menjunjung tinggi HAM harus menyikapi persoalan ini dengan sungguh-sungguh dan menentukan langkah, karena masalah Rohingnya adalah isu kemanusiaan. DPR mempercayakan kepada Pemerintah untuk bertindak pro-aktif menangani masalah ini, baik melalui jalur diplomasi maupun melalui langkah lainnya. Indonesia tidak boleh tinggal diam, karena upaya menciptakan perdamaian dunia, merupakan salah satu amanat konstitusi negara. **

DPR Minta Presiden Bantu Minimalisir Berbagai Hambatan

Pimpinan DPR RI meminta Presiden membantu meminimalisir berbagai hambatan, sehingga efektifitas penyelesaian Rancangan Undang-Undang dapat dioptimalkan.



DPR berpandangan bahwa Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah tanggung jawab bersama, mengingat Prolegnas disusun sebagai instrumen pembangunan hukum, sekaligus sebagai bagian dari pembangunan nasional yang pada hakekatnya menjadi sarana untuk mewujudkan tujuan nasional.

Demikian disampaikan Ketua DPR RI Marzuki Alie dalam Rapat Paripurna Pembukaan masa Persidangan I Tahun Sidang 2012-2013, Kamis (16/8) di gedung DPR.

Rapat Paripurna malam ini juga sekaligus mendengarkan pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan RAPBN Tahun 2013 beserta Nota Keuangan.

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPR RI juga meminta kepada fraksi-

fraksi dan para anggota DPR untuk mengoptimalkan fungsi legislasi dengan pembahasan yang lebih intensif dan efektif.

Marzuki mengatakan, dalam Masa Persidangan I ini, selain fokus untuk melakukan penyelesaian pembahasan RUU APBN 2013, DPR akan mengoptimalkan fungsi legislasi. Fungsi ini merupakan salah satu fungsi utama DPR, capaiannya tidak terlepas dari hasil yang telah diperoleh dari tahun sidang sebelumnya.

Marzuki mengakui, selama Tahun Sidang 2011-2012 yang ditutup akhir Juli lalu, capaian produk legislasi yang dihasilkan memang masih jauh dari harapan, karena capaiannya tidak berbanding lurus dengan perencanaan Program Legislasi Nasional yang telah ditetapkan.

Minimnya capaian produk legislasi pada Tahun Sidang 2011-2012, hendaknya menjadi perhatian bersama, baik DPR maupun Pemerintah.

Beberapa kendala yang ditemui dan menjadi hambatan dalam proses penyelesaian RUU antara lain berkaitan dengan adanya perbedaan pandangan yang cukup tajam terhadap suatu sustansi, baik antara DPR dengan Pemerintah maupun di antara fraksi-fraksi DPR.

Menurut Marzuki, perbedaan pandangan adalah hal yang wajar di dalam proses berdemokrasi. Penyelesaian dalam menyikapi perbedaan pendapat diupayakan melalui musyawarah mufakat. Upaya ini dilakukan untuk memperoleh hasil optimal guna mencapai kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan negara dan masyarakat.

Pada Masa Persidangan I, II, III dan IV Tahun Sidang 2011-2012, atas dasar penetapan Prolegnas 2011, DPR dan Pemerintah dapat menyelesaikan 26 RUU, baik RUU Prioritas yang datang dari DPR dan Pemerintah, maupun RUU Kumulatif Terbuka yaitu RUU yang berkaitan dengan APBN dan Pengesahan Konvensi.

Beberapa RUU yang mengalami perpanjangan beberapa kali dan belum juga tuntas, diantaranya RUU tentang Aparatur Sipil Negara, RUU tentang Keistimewaan Provinsi Yogyakarta, RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar, RUU tentang Pangan, RUU tentang Koperasi, RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro, RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah, RUU tentang Pendidikan Kedokteran dan RUU tentang Organisasi Masyarakat. (tt)foto:wy/parle

Kemenhan Raih Alokasi RAPBN 2013 Sebesar Rp. 77.7 Triliun

Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi anggaran RAPBN Tahun 2013 terbesar yaitu Rp. 77.7 Triliun. Sementara terdapat tujuh Kementerian lainnya yang memperoleh alokasi anggaran diatas Rp. 20 Triliun.



Suasana rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng



Anggota Panja P3SON Hambalang Komisi X Zulfadhli

Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ketujuh kementerian tersebut yaitu Kementerian Pertahanan dengan alokasi anggaran sebesar 77.7 Triliun, Kementerian Pekerjaan

Umum Rp. 69.1 Triliun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp. 66 Triliun, Kepolisian Republik Indonesia Rp. 43.4 Triliun, Kementerian Agama Rp. 41.7 Triliun, Kementerian Perhubungan Rp. 31.4 Triliun dan Kementerian Kesehatan Rp. 31.2 Triliun.

Penetapan ketujuh kementerian tersebut berdasarkan arah kebijakan dan sasaran strategis dari Pemerintah. Didalam RAPBN 2013 mendatang, anggaran belanja negara direncanakan sebesar Rp. 1657.9 Triliun atau naik Rp. 109.6 Triliun (sebesar 7.1 persen) dari pagu APBN-P 2012.

Jumlah tersebut akan dialokasikan kepada tiga kelompok besar belanja masing-masing untuk belanja kementerian negara atau lembaga Rp. 547.4 Triliun, belanja Non Kementerian Negara atau Lembaga Rp. 591.6 Triliun, dan Transfer ke daerah Rp. 518.9 Triliun.

SBY menambahkan, alokasi anggaran pada Kementerian Pertahanan

diprioritaskan untuk mendukung terlaksananya modernisasi dan peningkatan alat utama sistem persenjataan (alutsista), anggaran itu juga dialokasikan untuk memenuhi fasilitas dan sarana-prasarana dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan kekuatan pokok minimum dengan daya dukung, daya tangkal dan daya gempur yang tinggi sehingga memiliki daya penggentar yang kuat. "Kita telah menetapkan kebijakan untuk mengutamakan pengadaan alutsista hasil produksi dalam negeri,"katanya.

Didalam RAPBN tahun 2013 mendatang, lanjutnya, kita tetap dapat memenuhi lagi amanat konsitusi untuk mengalokasikan anggarana pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. "Kita bersyukur dari tahun ke tahun alokasi anggarana pendidikan dapat terus ditingkatkan pada tahun 2011 anggaran pendidikan telah mencapai Rp. 266.9 Triliun, dan tahun 2013 mendatang kita rencanakan sebesar Rp. 331.8 Triliun atau naik 6.7 persen,"ujarnya

Sementara, pada tahun 2013 PNBP direncanakan mencapai Rp. 324.3 Triliun atau menyumbang sekitar 21 persen dari total pendapatan negara. "Untuk mengoptimalkan pencapaian target PNBP ini, pemerintah akan terus melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan lifting migas,"katanya saat menyampaikan pidato RUU RAPBN Tahun 2013, di Gedung Nusantara, Kamis, (16/8).

Menurutnya, upaya ini akan didukung dengan kebijakan fiskal dan nonfiskal serta penyempurnaan pengaturan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sektor pertambangan, terutama migas dan batubara. (si)foto: iwan armanias/parle

Pemerintah Diminta Fokus Menjaga Stabilitas Harga

Menjelang datangnya Hari Raya Idul Fitri 1433 H, DPR meminta Pemerintah fokus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan penyediaan atau perbaikan infrastruktur transportasi.

Hal itu disampaikan Ketua DPR RI dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2012-2013, di Gedung Nusantara DPR RI, Kamis (16/8).

Pembukaan Rapat Paripurna kali ini juga sekaligus mendengarkan Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2013 beserta Nota Keuangannya.

Pagi sebelumnya, Presiden juga telah menyampaikan Pidato dalam rangka HUT ke -67 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, di depan sidang bersama DPR RI dan DPD RI.

Marzuki mengatakan, akhir-akhir

ini harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan pada hampir seluruh wilayah. Hal ini menuntut Pemerintah untuk menjaga stok pangan yang cukup dan mengendalikan harga agar tetap terjangkau.

Terkait dengan persiapan transportasi menjelang dan pasca lebaran, DPR juga meminta kepada Pemerintah agar hal ini ditangani dengan sebaik-baiknya.

Menurut Marzuki, kita harus mengakui bahwa masyarakat kita masih mengagungkan nilai-nilai tradisi silaturahmi kepada orang tua, saudara dan kerabat, yang kesemuanya diwujudkan dalam budaya mudik.

Untuk itu, katanya, DPR meminta kepada aparat keamanan dan Kementerian Perhubungan untuk mempersiapkan sarana dan prasarana trans-

portasi, sehingga perjalanan mudik dapat dilakukan dengan aman, nyaman sampai ke tempat tujuan dan meminimalisir jumlah kecelakaan sebagai akibat dari tingginya arus mudik dan arus balik.

Hal lain yang menjadi perhatian DPR adalah program ketahanan pangan. Dalam pembahasan RAPBN Tahun 2013, DPR akan mendukung kebijakan fiskal untuk membangun ketahanan pangan nasional.

Menurut Marzuki, dalam jangka panjang masalah pangan seharusnya menjadi prioritas guna mengantisipasi timbulnya krisis pangan, termasuk permasalahan lahan dan infrastruktur irigasi, serta pengembangan varietas unggul, merevitalisasi sektor pertanian, terkait dengan kebutuhan pokok pangan dan bahan bakunya.(tt)/foto:

Komisi VI DPR RI Tidak Ingin Ada Kemacetan di Pelabuhan Merak

SEJUMLAH Anggota Komisi VI DPR RI dipimpin oleh Aria Bima dari Fraksi PDI P mengunjungi Pelabuhan Merak, pada Rabu (15/8).

Kunjungan ini dalam rangka meninjau kesiapan arus mudik. Selain mengunjungi pelabuhan merak, komisi VI juga mengunjungi pelabuhan Merak, PT Angkasa Pura II dan Stasiun Gambir untuk memantau kesiapan infrastruktur dan angkutan Lebaran menjelang Lebaran 2012. Menghadapi lonjakan arus penumpang Lebaran yang tinggal beberapa hari lagi, Pelabuhan Merak siap mengantisipasi lonjakan penumpang.

Fenomena mudik Lebaran bukan hanya menjadi tanggung jawab PT Angkutan Sungai Danau Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry, PT Angkasa Pura II atau PT Kereta Api Indonesia, tapi harus menjadi tanggung jawab bersama. Prosesi mudik sudah merupakan prosesi tetap setiap tahun, dan dari tahun ke tahun pelayanan infrastruktur maupun angkutan harus ditingkatkan. Tentunya, harus selalu melakukan evaluasi untuk perbaikan di tahun depan. Dan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Dalam kunjungannya, Komisi VI DPR menegur keras PT ASDP Indonesia Ferry terkait sering terjadinya kemac-

etan di area menuju lokasi tersebut. Selain itu, teguran keras juga disampaikan terkait kurangnya fasilitas armada kapal yang kurang memadai, sehingga mengkhawatirkan terjadi kecelakaan di laut. Selain itu, wakil rakyat juga menyoroti sistem manajemen perusahaan penyeberangan yang dinilai kurang profesional, sehingga sering menimbulkan kemacetan hingga ke dalam tol Tangerang-Merak, yang merugikan masyarakat.

Ahmad Mumtaz Rais (F-PAN) menyatakan, berapapun dermaga yang berada di Pelabuhan Merak, tidak akan menuntaskan permasalahan di pelabuhan penghubung Jawa-Sumatera itu, bila traffic management perusahaan tersebut tidak segera dibenahi. Bahkan dia pun pesimis, jika semua direksi yang ada di ASDP tidak diganti, manajemen yang ada di Pelabuhan Merak tidak akan menyelesaikan permasalahan pelik yang membelenggu pelabuhan tersebut.

“Jika tetap seperti ini, kalau manajemennya tidak baik, maka macet ya tetap macet saja, tidak akan beres, tegasnya.

Dia mengaku mengetahui betul perjalanan dan perkembangan PT ASDP Cabang Utama Merak, mulai dari pelabuhan tersebut hanya memiliki satu dermaga hingga sekarang memiliki lima dermaga. “Saya tahu betul perkembangan Pelabuhan Merak, jadi saya tahu persis kondisi yang ada di sini,” tegasnya.

Sermentara itu, Edhy Prabowo dari Gerindra menyatakan terkait kemacetan yang sering terjadi di wilayah Merak itu, supaya pihak pengelola bertindak tegas untuk masalah ini, karena jangan sampai hal ini terjadi terus sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas, begitu pula masalah kapal, jangan sampai kapal yang dipakai untuk penyeberang yang tidak layak pakai, sehingga sangat membahayakan.

“Oleh karena itu, pihak ASDP dan instansi terkait supaya duduk bersama memecahkan persoalan kemacetan di Merak ini,” tegas Edhy. Sedangkan, Chairuman Harahap menegaskan, pada musim mudik ini saya harap supaya tidak terjadi kemacetan. (as)

Pemerintah Akan Bangun 4431 Km di Tahun 2013

Pemerintah akan mengalokasikan anggaran dalam RAPBN 2013, untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Jalan sepanjang 4.431 km akan dibangun dari Sumatera hingga Papua. Hal itu disampaikan Presiden SBY dalam pidato Nota Keuangan 2013 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8)

Menurutnya, pembangunan itu bertujuan meningkatkan tingkatan kapasitas jalan Lintas Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua sepanjang 4.431 km.

“Pembangunan infrastruktur ini harus dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi serta memperluas kesempatan kerja, alokasi anggaran belanja modal kita prioritaskan untuk mendukung ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keterhubungan domestik (domestic connectivity),”paparnya.

Selain jalan, untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang mempunyai daya dorong kuat terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga berencana menggunakan anggaran belanja modal kita rencanakan antara lain untuk: peningkatan kapasitas 188 megawatt, serta pembangunan transmisi sekitar 3.625 kilometer sirkuit (kms); Gardu Induk 4.740 Mega Volt Ampere (MVA); Jaringan Distribusi 9.319 kms; dan Gardu Distribusi 213 MVA.

“Selain itu, alokasi anggaran infrastruktur juga kita prioritaskan untuk pembangunan pelabuhan, berupa penyediaan sarana dan prasarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan (SDP), pengelolaan prasarana lalu lintas SDP di 61 dermaga, serta pengembangan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan di 25 lokasi,” katanya.

Dalam RAPBN 2013, alokasi belanja modal (untuk infrastruktur) direncanakan sebesar Rp 193,8 triliun, atau naik Rp 25,2 triliun (14,9%) dari pagu anggaran dalam APBN-P 2012. Semen-

tara untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja negara, pemerintah secara konsisten senantiasa berupaya seoptimal mungkin menin-

gkatkan alokasi anggaran untuk kegiatan yang lebih produktif, khususnya pembangunan infrastruktur. (si)foto: wy/parle



Tantangan Terberat Pembangunan Infrastruktur, APBN Yang Terbatas

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, tantangan terberat dalam pembangunan infrastruktur dewasa ini adalah kebutuhan infrastruktur yang amat tinggi di seluruh wilayah Indonesia, sementara anggaran yang tersedia di APBN relatif terbatas.



Suasana Sidang Excom dan Al-Fokom ke-9 di Yogyakarta

Hal itu disampaikan Presiden dalam Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-67 Proklamasi Kemerdekaan RI, Kamis (16/8) di gedung DPR/MPR.

Presiden mengatakan, meskipun tahun-tahun terakhir ini telah meningkatkan anggaran belanja modal dan pembangunan infrastruktur, tetap saja anggaran APBN masih terbatas. Oleh karena itu, Presiden minta agar daerah juga mengalokasikan APBD-nya untuk belanja modal, dan tidak habis untuk belanja pegawai dan belanja rutin.

“Insyallah, tahun 2013 mendatang transfer dana ke daerah akan berjumlah lebih dari Rp. 500 triliun,” katanya. Dia juga mengundang BUMN dan Swasta untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk mempercepat dan memperluas pembangunan infrastruktur ini.

Jika tidak, katanya, ekonomi Indo-

nesia yang tumbuh rata-rata 6 persen dewasa ini, dengan peluang investasi yang amat besar, tidak akan mencapai hasil yang setinggi-tingginya.

Untuk dapat lebih mengoptimalkan ‘golden opportunity’, ketersediaan dan kualitas infrastruktur merupakan syarat keharusan (necessary condition). Tentunya, kata Presiden, kita perlu mendukung usaha nasional dalam akselerasi pembangunan infrastruktur untuk menjamin keberlanjutan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan penciptaan lapangan usaha baru.

Presiden menambahkan, pembangunan infrastruktur terkait erat dengan iklim investasi. Jika iklim investasi terasa menyejukkan dan kepastian hukum mendapat tempat yang selayaknya, maka terbuka lebar bagi kita

untuk lebih banyak membangun Infrastruktur di seluruh tanah air.

Potensi dan peluang yang terbentang luas di negara kita, sesungguhnya akan menarik bagi para investor untuk berinvestasi. “Inilah peluang emas atau ‘golden opportunity’ yang tidak boleh disia-siakan,” katanya.

Ditambahkannya, iklim investasi dan kepastian hukum di Indonesia masih mengalami sejumlah hambatan. Hal ini sering menjadi keluhan dari berbagai kalangan.

Ke dua hal itu berpotensi menciptakan ketidakpastian, ekonomi biaya tinggi (high cost economy) dan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkualitas.

Juga ada keluhan ketika urusan pada tingkat pusat sudah selesai, justru hambatannya ada di daerah. Kondisi ini tentunya menuntut bekerja lebih keras untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi.

Terkait dengan hal itu, Pemerintah juga telah dan sedang mengevaluasi 13.520 Peraturan Daerah dan 824 Peraturan Daerah telah dibatalkan.

Untuk meningkatkan aliran investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam negeri (PMDN) perlu diimbangi dengan kecepatan dan kemudahan perijinan. Pemerintah, katanya, telah menekan dan mempercepat penerbitan ijin berusaha dari semula 60 hari menjadi 17 hari.

Sama pentingnya dengan itu, upaya penegakan hukum sangat penting untuk meningkatkan rasa aman dan stabilitas dalam berinvestasi. (tt) foto: ry/parle

Komisi VI Tinjau Kesiapan Bandara Soeta Hadapi Arus Mudik

Kesiapan PT. Angkasa Pura selaku operator Bandara Internasional Soekarno-Hatta menghadapi arus mudik Idul Fitri 1433 H. menjadi perhatian Komisi VI DPR RI.

Mendekati puncak arus mudik tahun ini yang diperkirakan pada H-3 pelayanan di bandara perlu ditingkatkan untuk menghindari penumpukan penumpang di bandara yang menjadi pintu gerbang utama Indonesia ini.

“Tentu kita lihat kesiapan untuk mendekati hari H Lebaran terutama domestik di Terminal 1 ini. Terminal 1 ini banyak yang dikeluhkan terlalu padat, over crowded dan kebersihannya kurang. Kita lihat apa yang sudah dikerjakan Angkasa Pura termasuk ekspansi ruang tunggu ini sehingga tidak terjadi penumpukan penumpang di gang-gang,” kata Airlangga Hartarto, Ketua Komisi VI DPR RI kepada wartawan saat memimpin Tim Kunjungan Spesifik ke Bandara Soeta, Kamis (16/8/12).

Tim Kunjungan Spesifik Komisi VI diantaranya Lili Asjudiredja FPG, Iskandar D. Syaichu FPPP, Atte Sugandi FPDemokrat terlihat menyapa sejumlah calon penumpang yang bersiap melakukan perjalanan mudik. Perluasan ruang tunggu dinilai cukup berhasil sehingga memberi keleluasaan kepada penumpang dalam menunggu keberangkatan pesawat.

“Sekarang H-5 belum terlihat lonjakan penumpang yang berarti ya. Kita perhatikan perluasan ruang tunggu cukup berhasil, terlihat masing banyak bangku kosong. Kita minta Angkasa Pura mengantisipasi lonjakan penumpang tertinggi terjadi pada H-3,” kata Atte Sugandi.

Pada bagian lain Airlangga Hartarto menyebut banyak mendengar keluhan publik tentang tingginya kemacetan di Bandara Soeta pada saat jam sibuk pagi hari. Ia berharap Angkasa Pura dapat mengoptimalkan fasilitas yang ada pada jam-jam puncak seperti pagi hari. Disamping itu perlu diperhatikan koneksi antara Terminal 1, 2 dan 3

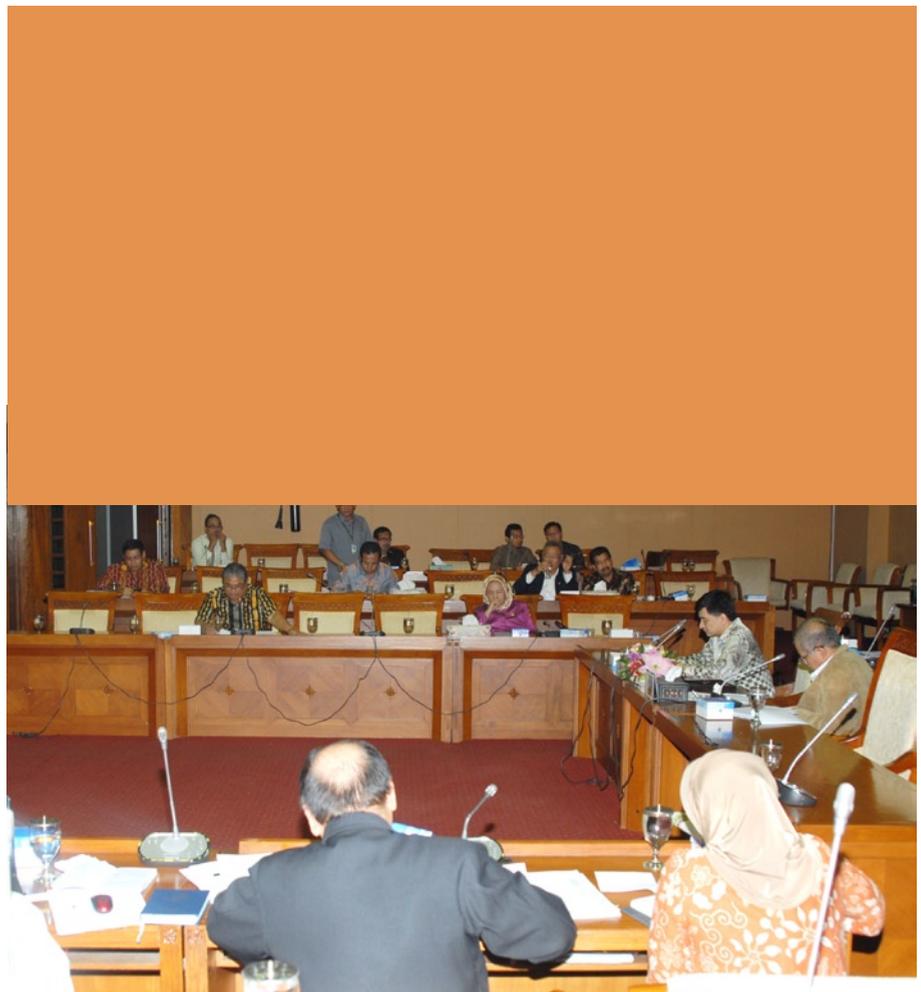
terutama bagi penumpang yang akan transit.

“Jadi kita perlu fikirkan bagaimana antara terminal 1,2,3 ini bisa tersambung terutama bagasi. Kalau tidak tentu merepotkan penumpang. Solusi layanan bus gratis yang sudah disediakan Angkasa Pura kita nilai belum memadai, masih menyulitkan penumpang transit yang membawa banyak barang,” lanjutnya.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini mengingatkan memperhatikan lon-

jakan penumpang yang sudah mencapai 52 juta/tahun jauh dari kapasitas tersedia 20 juta, maka pengembangan dan peningkatan fasilitas bandara mendesak untuk dilakukan.

“Ada pengembangan Terminal 3 sehingga kapasitas bisa meningkat sampai 62 juta tetapi itu saya rasa sudah akan tercapai dalam waktu tiga tahun ini. Padahal yang kita perlukan adalah pengembangan untuk waktu yang lebih panjang,” kata dia. (iky) foto:iky/parle



Suasana rapat Badan Legislasi DPR mengenai pembahasan RUU Tapera

Apresiasi Pidato Kenegaraan Presiden SBY

Anggota DPR Bobby Adhityo Rizaldi (F-PG) mengapresiasi Pidato Kenegaraan Presiden SBY dalam rangka HUT ke-67 Proklamasi Kemerdekaan, yang menyatakan bahwa Indonesia menjadi 16 besar emmerging market di dunia yang cukup pesat.

“Memang kalau benar sangat bagus dan kita apresiasi target pencapaiannya,”ujarnya kepada Parle di ruangnya menanggapi Pidato SBY pada Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Kamis, (16/7)

Terkait persoalan Hukum, Dia menilai, hukum seharusnya tidak tebang pilih namun pelaksanaannya ada kebijakan yang di kriminalisasi, dan kasus sama namun prosesnya beda satu di Tipikor dan pengadilan biasa. “Soal Hukum ini seharusnya sudah on track ada satu di 6 hal soal korupsi, semua lembaga adhoc komisi itu bertujuan mengembalikan kepercayaan institusi penegak hukum, kapan wewenangnya kembali lagi ke kepolisian dan kejaksaan seolah-olah ada lembaga diluar

institusi penegak hukum,”paparnya.

Menyinggung mengenai investasi di sektor Mineral dan Migas, dia mengatakan, Sesuai UU memang kepemilikan Sumber Daya Alam (SDA) itu dikuasai negara. Memang dahulu situasi berbeda karena SDM, dan modal masih belum mampu sementara saat ini, kemampuan SDM di Indonesia sudah cukup mumpuni. “Kita mendorong Indonesia dapat bersaing di dalam Negeri dan hasilnya digunakan untuk kepentingan dalam negeri. Begitu juga di mineralpun harus begitu. Keberpihakan pemerintah sudah ada tetapi harus dijaga momentumnya,”katanya.

Revisi UU Migas, lanjut Bobby, ini memang ada fasenya yaitu menguatkan peran negara, memberikan kes-

empatan swasta, kemudian kebijakan berpihak menguatkan peran nasional. “Peraturan pelaksanaannya di Minerba juga sudah turun, hasil SDA jangan dijual tanahnya saja tetapi harus sudah ada nilai tambah,”paparnya.

Harapan kedepan, paparnya, Pemerintah harus berani melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih sehingga ada kepastian terhadap orang yang mau berinvestasi selanjutnya, perlu ada keberanian untuk merevitalisasi. “Yang tidak kalah pentingnya yaitu merenegoisasi kontrak-kontrak yang tidak menguntungkan bagi Pemerintah Indonesia,”ujarnya. (si)foto:iwan armanias/parle

Penataan Gambir Harus Ditularkan ke Stasiun Lain

Komisi VI DPR RI menyampaikan apresiasi kepada jajaran PT. Kereta Api Indonesia (KAI) yang telah berhasil menata Gambir menjadi stasiun yang lebih tertib dan pantas dibanggakan di pusat Ibukota negara. Keberhasilan itu hendaknya dapat ditularkan ke stasiun lain di daerah.

“Kelihatan Gambir menuju ke arah yang lebih baik, pelayanan tiket diperluas, online, supermarket. Percaloan kita lihat ada kebijakan nyata, tiket dari calo sudah tidak bisa naik kereta. Mudah-mudahan itu dijaga terus dan ini harus ditularkan ke stasiun-stasiun lain,” kata Azam Asman Natawijaya anggota Tim Kunjungan Spesifik Komisi VI saat meninjau pelayanan arus mudik di stasiun Gambir, Jakarta, Rabu (15/8/12).

Sebagai contoh ia menyebut stasiun kereta api Bandung yang dinilainya masih belum mendapat penataan sebagaimana mestinya, padahal tidak jauh dari kantor pusat PT. KAI. Kebijakan penataan Gambir hendaknya berdasarkan semangat ingin melayani publik lebih baik, bukan sekedar terlihat bagus karena berada tidak jauh dari Istana Negara.

Tim Kunjungan Spesifik Komisi VI terlihat meninjau beberapa fasilitas Arus Mudik di stasiun Gambir seperti Posko Kesehatan, Posko Keamanan, Ruang Customer Service termasuk meninjau fasilitas toilet dan mushalla. Calon penumpang yang sedang menunggu jadwal keberangkatan kereta dimintai pendapatnya terhadap layanan yang mereka peroleh.

“Kita juga cek pengamanan di kereta api, apa jaminan keamanan lebih baik dari tahun kemaren itu masih kita uji, kita berharap dengan kebijakan tidak ada lagi penumpang berdiri seharusnya keamanan menjadi lebih baik. Kalau keamanan lebih baik tingkat kecelakaan akan lebih rendah,” ujar Erik Satria Wardhana, Wakil Ketua Komisi VI.

Sementara itu anggota tim dari FP Demokrat Ida Ria menilai sampai H-5 belum terjadi lonjakan berarti penumpang kereta api. Keberhasilan persiapan yang telah dilakukan jajaran PT.



Tim Delegasi Vietnam pada Sidang Excom Meeting di Yogyakarta



KAI menurutnya masih akan diuji pada saat puncak keberangkatan yang diperkirakan terjadi pada H-3 yang akan datang.

Ida Ria pada saat meninjau ruang Customer Service PT. KAI sempat menegur staf pelayanan yang tidak

mengenakan seragam. “Kenapa tidak pakai seragam. Pakai dong, perhatikan kamu bangga melayani pelanggan sebagai karyawan BUMN. Itu sebaiknya harus ditunjukkan ya,” spanya sambil tersenyum. (iky)

Pansus RUU Desa Kunjungi Brasil 26 September Mendatang

Pansus RUU Desa akan mengadakan Kunjungan Kerja ke Brasil pada tanggal 26-1 September ini.

“UU tentang Desa ini bertujuan hendak mengangkat desa pada posisi subyek yang terhormat dalam ketatanegaraan Republik Indonesia,” kata Ketua Pansus RUU tentang Desa Achmad Muqowam dalam siaran persnya kepada Parlemen, Jum’at, (24/8).

Menurutnya, pengaturan desa akan menentukan format desa yang tepat sesuai dengan konteks keragaman lokal. Penguatan kemandirian melalui UU tentang desa menempatkan desa sebagai subyek pemerintahan dan pembangunan yang betul-betul berangkat dari bawah (bottom-up).

Dalam kunjungannya ke Brasil, Terang Muqowam, bertujuan mempelajari negara lain dalam menata desa, dan pemberian kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, serta mempelajari bagaimana negara lain dalam hal mengatur tentang penyelenggara pemerintah desa. “Terkait ini kita ingin mempelajari struktur organisasi dan tata kerja pemerintah

desa, juga mengenai tugas wewenang, hak dan kewajiban kepala desa, larangan, pemberhentian dan pemilihan desa,” paparnya.

Selain itu, lanjutnya, Tim ingin mengetahui bagaimana negara lain mengatur tentang keuangan desa, termasuk dalam hal ini adalah kekayaan desa, reforma agraria. “Kita juga ingin mempelajari negara lain dalam hal pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan,”ujarnya.

Alasan memilih Brasil, terangnya, dikarenakan Brasil mempunyai problem kemiskinan dan ketimpangan seperti desa-desa di Indonesia, namun mereka sudah mulai ada perbaikan. “Dalam memberantas kemiskinan di desa, Brasil menggunakan cara bagaimana mengatur produksi dan pemasaran secara kolektif, mereka juga sebagian besar masyarakatnya berdomisili di Pedesaan dan bersifat agraris,” tambahnya.

Brasil, kata Muqowam, adalah negara yang bisa dijadikan tempat untuk mempelajari bagaimana masyarakat

pedesaan memproduksi hasil-hasil pertanian, tetapi juga bagaimana mereka dapat mengakses pasar. “Petani-petani Brasil berhasil mengeksplorasi hasil pertanian mereka, dengan pengelolaan produksi bersama, membuat badan-badan usaha bersama sehingga kesulitan mereka teratasi,”katanya.

Muqowam mengatakan, Brasil merupakan daerah pedesaan yang berbasis pertanian dan banyak intervensi oleh pemerintah. “yang bisa membuat mereka bisa menyelesaikan permasalahannya adalah pengorganisasian dari para petani,”ujarnya.

Menurutnya, Brasil juga menghadapi persoalan pertanahan, mereka memiliki gerakan MST, kelompok petani yang tidak punya tanah namun ada pengorganisasian yakni bagaimana mengelola menduduki tanah yang tidak tergarap dan kemudian mengelolanya secara bersama dan memasarkannya secara bersama. (si)

UU TKI Belum Berikan Kepastian Bagi Tenaga Kerja

Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang sebenarnya sudah diatur dalam UU No. 39 tahun 2004, namun pada kenyataannya UU tersebut belum sepenuhnya memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang menyeluruh.



Jajaran Pimpinan Sidang AIPA pada sidang Excom di Yogyakarta

Demikian yang dikatakan Ketua DPR Marzuki Alie pada saat Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2012-2013 di Gedung Utama Nusantara, Kamis (16/8) malam.

Ketua DPR Marzuki Alie mengemukakan, oleh karena itu, DPR menganggap perlu melakukan revisi terhadap UU tersebut. Revisi ini telah disiapkan oleh Komisi IX, dan telah disetujui menjadi RUU DPR dan siap dibahas pada masa sidang yang akan datang dengan judul RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

Marzuki Alie menegaskan, beberapa pertimbangan dilakukannya revisi terhadap UU tersebut antara lain, bahwa UUD NRI tahun 1945 menjamin setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Upaya perlindungan kepada pekerja Indonesia di luar negeri merupakan bentuk dari perwujudan hak dan kesempatan yang sama bagi TKI untuk



memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak sesuai dengan keterampilan, kemampuannya, Sementara bakat yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat dan hak asasi manusia.

Dia mengatakan, selain Tenaga Kerja Indonesia (TKI), persoalan lain yang tidak kalah penting dan mendapat perhatian adalah persoalan kesejahteraan buruh. Dalam beberapa bulan terakhir, DPR mencatat setidaknya 3 kali demo

besar-besaran buruh, ungkap Ketua DPR Marzuki Alie.

Marzuki Ali menambahkan, dirinya bersyukur bahwa aksi demo tersebut tidak berlanjut menjadi anarkis. Namun, hal ini setidaknya merupakan sinyal bagi DPR dan juga pemerintah untuk memperhatikan tuntutan mereka tentang kerja yang layak, upah yang adil dan peningkatan kesejahteraan dari waktu ke waktu. (Spy).foto: wy/parle

Gaji PNS, Pensiunan, TNI dan Polri Naik 7 persen

Pemerintah merencanakan penyesuaian gaji pokok dan pensiun pokok PNS serta anggota TNI dan Polri sebesar rata-rata 7 persen di tahun 2013 mendatang.

“Pemerintah juga merencanakan kenaikan gaji para hakim ke tingkat yang lebih baik sepadan dengan tugas dan tanggung jawabnya,” ujar Presiden SBY saat menyampaikan RUU RAPBN Tahun anggaran 2013, di Gedung Nusantara, Kamis, (16/8).

Dengan pokok-pokok kebijakan itu, alokasi anggaran belanja pegawai dalam RAPBN 2013 direncanakan sebesar 241.1 Triliun. Jumlah ini meningkat Rp. 28.9 Triliun atau 13,6 persen dari pagu belanja pegawai dalam APBN-P 2012.

“Dalam rangka menuntaskan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi pada kementerian Negara atau lembaga, peningkatan alokasi belanja

pegawai itu juga direncanakan untuk anggaran remunerasi,” paparnya.

Prioritas nasional lainnya yang telah ditetapkan adalah reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Sebagai bagian dari kelanjutan reformasi birokrasi, pada tahun 2013 mendatang Pemerintah berkomitmen untuk memberikan perhatian pada perbaikan kesejahteraan aparatur negara baik PNS maupun TNI dan Polri serta para pensiun. “Karena itu pemerintah akan meneruskan kebijakan pemberian gaji dan pensiun gaji bulan ke 13 yang akan dibayarkan pada tahun ajaran baru,” tandasnya. (si)/foto:iwan armanias/parle.

Mantan Dirut Perum Perhutani Dilantik Menjadi Anggota DPR

Marsanto M.S. mantan Dirut Perum Perhutani 2001-2005 dilantik menjadi anggota DPR RI Pengganti Antar Waktu (PAW). Ia menggantikan Soewarno koleganya di PDIP dari daerah pemilihan Jawa Timur IX yang mengundurkan diri.

“Saya nomor urut dua dalam pemilu lalu. Amanat rakyat ini akan saya lanjutkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan sumpah yang tadi telah saya ucapkan,” jelasnya kepada wartawan usai pelantikan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/8/12).

Sebagai mantan profesional yang telah lama berkarir dibidang pertanian dan kehutanan, ia berkeyakinan pemahamannya akan dapat membantu tugasnya di DPR. “Saya di Perhutani pensiun dini tahun 2006, kemudian beralih ke partai. Kalau boleh memilih saya ingin melanjutkan pengabdian di Komisi IV tetapi itu sepenuhnya terserah fraksi,” imbuhnya.

Sementara itu Ketua FPDIP DPR

Puan Maharani yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menyambut baik kehadiran anggota barunya. Ia berharap Marsanto dapat segera menyesuaikan diri dengan tugas kedewanan dan siap berkarya dalam kerja-kerja politik kedepan dengan mengutamakan semangat kolektif dan kolejial.

Ia meyakini kader PDIP akan dapat mengedepankan rakyat walaupun target politik pemilu 2014 sudah didepan mata. “Komitmen beliau sebagai seorang politikus karena sudah menjadi anggota DPR tentu saja kami bisa andalkan, semoga komitmen itu bisa dijaga sampai akhir tugas 2014 nanti,” tandas Puan. (iky)/foto:wy/parle

Pidato Kenegaraan 16 Agustus Diliput 400 Lebih Wartawan

Sidang Paripurna DPR yang beragendakan Pidato Kenegaraan Presiden menyambut HUT RI ke-67 Kamis 16 Agustus 2012 menarik perhatian pers dalam maupun luar negeri.

Tercatat dari data di Bagian Pemberitaan DPR 400 orang lebih wartawan baik media cetak, elektronik maupun media on line. Sidang paripurna berlangsung dua kali, pada pagi hari Pidato Kenegaraan Presiden yang merupakan konvensi sebagai rangkaian menyambut HUT RI, sedangkan pada malam harinya Sidang Paripurna DPR mendengarkan Pidato Presiden sebagai Pengantar RUU APBN tahun 2013.

Acara sidang paripurna kali berlangsung cukup semarak selain merupakan sidang bersama dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), akan hadir pula Wakil Presiden, para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, Pimpinan Lembaga Tinggi dan lembaga negara lainnya, para duta besar negara sahabat serta dimeriahkan dengan kehadiran 1.063 penyandang teladan terdiri dari 42 jenis teladan dari 7 kementerian.

Dari Kementerian Pertanian antara lain Penyuluh Pertanian teladan dan petani berprestasi, Kemenakertrans terdiri transmigran teladan dan Petugas Pembina UPT Teladan, Kemenkes antara lain dokter dan bidan/perawat teladan, Kemendagri kepala desa dan lurah teladan, Ketua Tim Penggerak PKK dan Camat teladan serta dari Kementerian Kehutanan penyuluh kehutanan, kelompok dan desa/lurah teladan serta kader konservasi alam teladan. Sedangkan dari Kementerian Agama ada dua kelompok yakni Peserta keluarga Sakinah teladan dan Peserta KUA percontohan teladan.

Yang menarik, sebelum Presiden menyampaikan Pidato Kenegaraan menyambut HUT RI ke 67 pada pukul 10.00, para anggota DPR dan DPD akan disuguhi acara pemutaran film tentang DPR dan DPD berdurasi 20 menit mulai pukul 09.20-09.40 WIB.

Sedangkan pada acara malam

harinya akan diawali dengan Pidato Ketua DPR sekaligus sebagai Pidato pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2012-2013 dilanjutkan dengan Pidato Presiden dalam rangka pe-

nyampaian RUU APBN 2013. Dua lembaga tinggi negara baik DPR maupun DPD akan menerima dokumen RUU APBN tersebut dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (mp)

Undang-Undang Perguruan Tinggi Amanah Konstitusi

Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, pengelolaannya perlu mendapatkan perhatian secara serius dan terus menerus, sehingga pengelolaan perguruan tinggi baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat mampu mewujudkan visi pendidikan nasional.



Suasana rapat kerja Komisi X DPR

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi X DPR Syamsul Bachri saat membacakan Laporan Komisi X DPR dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Dikti pada Sidang Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR/Korkesra Taufik Kurniawan, di Gedung Nusantara II DPR, Jum'at (13/7).

“Negara bertanggungjawab atas pengaturan pengelolaan perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan warga negara dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi,” ujarnya.

Kewajiban pemerintah, lanjutnya, adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, persatuan

bangsa, untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

Dia menambahkan, pemerintah juga berkewajiban memajukan pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia.

Selain itu, lanjutnya, dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi sebagai sub-sistem pendidikan nasional, maka pemerintah melalui Kementerian yang membidangi urusan pendidikan bertanggungjawab sebagaimana ketentuan dalam UUD 1945 Pasal 17 ayat (3).

Dia menjelaskan, dalam Penjelasan Umum UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyatakan bahwa visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk

memberdayakan semua warga negara Indonesia, berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan jaman yang selalu berubah.

“Sub-sistem pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional perlu memiliki landasan pengelolaan yang kuat untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujarnya.

Komisi X DPR, lanjut Syamsul, berpandangan bahwa pengaturan pendidikan tinggi tidak cukup hanya diatur oleh Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, tambahnya.

Menurutnya, bahwa untuk melindungi hak seluruh warga negara mendapatkan akses pendidikan sesuai UUD 45 Pasal 31, maka pengaturan penyelenggaraan pendidikan tinggi perlu peran serta masyarakat. “Pokok pikiran dan sikap RUU tentang Pendidikan Tinggi yang menyangkut beberapa substansi lex spesialis bertujuan mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi,” paparnya.

Syamsul menegaskan, bahwa bentuk tanggungjawab negara atas pengaturan pengelolaan perguruan tinggi salah satunya adalah dengan membentuk RUU tentang Pendidikan Tinggi.

Komisi X atas nama DPR sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi legislasi sekaligus mengemban amanah rakyat mendorong pengaturan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berpihak kepada masyarakat serta menjawab permasalahan pendidikan tinggi selama ini, tuturnya. (spy/iw)/ foto:iwan armanias/parle.

Pramono Anung Terima Korban Lumpur Lapindo

Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung menerima salah satu perwakilan korban Lumpur Lapindo Hari Suwandi dari Porong Sidoarjo di ruang kerjanya, DPR, Jakarta, Selasa, (10/7).

Kedatangan Hari ke DPR, guna memohon kepada anggota dewan dalam hal ini pimpinan DPR untuk bisa memfasilitasi pertemuan dengan Presiden.

“Selama 25 hari saya berjalan kaki dari kampung ke Jakarta, banyak suka duka, serta banyak dukungan dari sejumlah pihak termasuk media massa, tujuan saya ingin bertemu dengan Presiden, dan kami mohon DPR dapat memfasilitasinya,” kata Hari Suwandi.

Dihadapan Pramono, Hari mengungkapkan keluh kesahnya, dan mendesak agar PT. Lapindo Brantas dapat menuntaskan persoalan ganti rugi, “Saya mendesak PT. Lapindo Berantas, agar secepatnya menyelesaikan permasalahan ini,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil ketua DPR Pramono Anung menjelaskan, bahwa ia akan membahas permasalahan ini dalam rapat pimpinan, “Hari Kamis besok (12/7) ada rapat pimpinan, saya



Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung

akan coba fasilitasi supaya ini menjadi bagian dari pembicaraan pimpinan, dan kalau perlu dimasukkan agenda ketika pimpinan melakukan rapat konsultasi dengan presiden,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia menambahkan, apa

yang dilakukan Hari diyakini banyak yang mengikuti dan diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi siapapun yang harus bertanggung jawab terhadap berlarut-larutnya persoalan ini. (nt)foto:wy/parle

Sekjen AIPA Apresiasi DPR Telah Laksanakan Statuta

Untuk pertama kali sejak 30 tahun lebih organisasi parlemen anggota Asean (AIPA) berdiri, statuta tentang pelaksanaan Sidang Komite Eksekutif berhasil dijalankan. Artikel 9 ayat 2 mengatur Komite Eksekutif diharapkan bersidang setidaknya 3 bulan sebelum Sidang Umum untuk mempersiapkan program, agenda dan masalah relevan lainnya.

Saya sampaikan salut kepada Presiden AIPA, Ketua DPR RI Marzuki Alie atas inisiatif melaksanakan Statuta dengan benar,” kata Sekjen AIPA Antonio Cuenco saat menyampaikan pidato pada upacara pembukaan Sidang Excom dan Sidang ke-9 AIFOCOM di Yogya, Senin (9/7/12).

Ia menambahkan selama ini Sidang Excom dilaksanakan hanya beberapa jam sebelum sidang umum. Sehingga parlemen peserta sidang tidak optimal mendalami isu yang akan dibahas. Tugas utama Komite Eksekutif tekannya

sangat penting untuk memutuskan apakah satu agenda perlu dibahas, dimodifikasi, dikeluarkan atau ditambah sebelum dibawa ke Sidang Umum.

Pada bagian lain Antonio juga menyampaikan pelaksanaan sidang ke-9 AIFOCOM di Yogya penting seiring dengan peringatan yang disampaikan UNODC (United Nation Office on Drugs and Crime) yang menyatakan masalah narkoba di wilayah ini telah meningkat ke kondisi yang lebih buruk.

“Peredaran narkoba sudah berlangsung lintas negara, untuk me-

merangnya harus dijadikan sebagai kerja kolektif secara tegas dan berkesinambungan,” lanjut Sekjen yang berkebangsaan Filipina ini.

Secara khusus ia juga mengimbau delegasi sidang Excom AIPA untuk memberi perhatian khusus pada konflik yang terjadi antara China dan Taiwan. “Tensi konflik terus bertambah dan mempengaruhi kawasan. Asean dan AIPA perlu bekerja sama membantu mencari solusi agar terhindar dari kerusakan yang lebih serius,” demikian Antonio. (iky) foto:ry/parle



Ketua DPR RI Marzuki Alie berfoto bersama dengan para calon Dubes untuk negara-negara sahabat di Nusantara III DPR. Kamis, (12/07) foto: IW



Wakil Ketua Komisi X DPR Syamsul Bahri menyerahkan laporan RUU tentang Dikti dalam Rapat Paripurna DPR, Jumat, (13/07) foto: IW



Pembukaan Sidang AIPA ditandai pemukulan gong oleh Presiden AIPA, Marzuki Alie, senin (9/7) foto: RY



Delegasi Indonesia dipimpin oleh Ketua BKSAP Surahman Hidayat saat menyampaikan pernyataan resmi di rapat komite eksekutif AIPA senin (9/7) foto: RY



Delegasi AIPA meninjau Rumah Sakit Khusus Pelayanan dan NAPZA Ghrasia, Sleman, Yogyakarta. rabu (11/7) foto: RY



Delegasi AIPA mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta, rabu (11/7) foto: Dok Parle